

Tahun XXIV No. 1
Juli 2000
ISSN 0216 - 9363

media GIZI & KELUARGA



JURUSAN GIZI MASYARAKAT DAN SUMBERDAYA KELUARGA
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

11. Kajian Tentang Mutu Bubur Susu dari Tepung Kacang Merah (<i>Phaseolus Vulgaris L</i>) sebagai Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Rizal Damanik, Lilik Kustiyah, Sumali M. Atmojo, Sri Yuliani	71
12. Pengaruh Substitusi Tepung Kacang Merah (<i>Phaseolus Vulgaris L</i>) terhadap Sifat Fisik, Kimia, dan Organoleptik "Cookies" untuk Makanan Pendamping ASI Rizal Damanik, Sri Anna Marliyati, Sumali M. Atmojo, Dian Ekawati	79
13. Materi Konsultasi Gizi dan Klaim Iklan Makanan di Majalah dan Tabloid Nasional Nurrohmah, Hardinsyah dan Sri Rihati Kusno	89
14. Cara Sederhana Penilaian Mutu Gizi Makanan Ibu Hamil dan Anak Batita Hardinsyah, Meitycorfrida Mailoa dan Netti Herawati	98
15. Model Pendugaan Stok Beras Dadang Sukandar	104
16. Pengaruh Pemberian Minuman Turmeric (<i>Curcuma domestica</i>) terhadap Kadar Kolesterol Serum Tikus Nino Yayah Sa'diyah, Ahmad Sulaeman dan Edi S. Mudjayanto	109
17. Pola Pemantapan Kelompok Penerima Paket Kaji Tindak dengan Partisipasi Aktif Masyarakat (Fase Pemantapan Kemandirian) Clara M. Koeskarto, Nino Y. Sa'diyah, Ali Khomsan, Emmy Karsin dan Retnaningsih	116
18. Identifikasi Ketersediaan Biologis Mineral Seng Secara <i>In Vitro</i> pada Beberapa Jenis dan Cara Pemasakan Telur Rimbawan, Cesilia Meti Dwiriani, dan Ennita Fahriza	125
19. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Remaja dalam Mengonsumsi Makanan Siap Saji Modern dan Tradisional di SMUN 6 dan SMUN 46 Jakarta Selatan Derick Thiana, Diah K. Pranadji, Retnaningsih	136

MEDIA GIZI DAN KELUARGA

Tahun XXIV No. 1

Juli 2000

	Halaman
1. Tingkat Konsumsi Gizi, Status Gizi dan Kadar Haemoglobin pada Lacto-Ovo-Vegetarian dan Non-Vegetarian Herman, Emma S. Wirakusumah dan Nino Yayah Sa'diyah	1
2. Determinan Status Gizi Balita di Pedesaan NTT Hardinsyah, Amini Nasoetion, Suprihatin Guhardja dan Dadang Sukandar	9
3. Ukuran Sederhana Diversifikasi Konsumsi Pangan untuk Identifikasi Keluarga Rawan Pangan Hardinsyah, Sri Rihati Kusno dan Ali Khomsan	15
④ 4. Studi Evaluasi Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) di Kabupaten Soppeng A. Amrullah, Ujang Sumarwan, Sri Utami Kuntjoro, dan Ali Khomsan	21
5. Keragaan Konsumsi Pangan dan Kadar Serum Darah Mineral Besi (Fe) dan Seng (Zn) dalam Serum Darah Ibu Hamil Yekti H. Effendi, Dodik Briawan, dan Migi Barunawati	30
6. Hubungan Gaya Pengasuhan Orang Tua dengan Kenakalan Remaja (Kasus di SMU Jakarta Pusat) Novi Cahyaningsih, Dwi Hastuti Martianto dan Melly Latifah	35
⑦ 7. Analisis Persepsi Popularitas, Kualitas, dan Harga serta Hubungannya dengan Konsumsi Berbagai Merek Minyak Goreng Ujang Sumarwan	41
8. Mempelajari Kandungan Iodium Juice Rumput Laut (<i>Eucheama Cottonii</i>) sebagai Alternatif Penanggulangan GAKI (Gangguan Akibat Kurang Iodium) Endang Rohmawati, Hidayat Syarief, dan Sri Anna Marliyati	48
9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai-nilai Keluarga dan Kecerdasan Emosional Anak Usia Sekolah Veriati Siregar, Ratna Megawangi, dan Dwi Hastuti	53
10. Kebiasaan Pengolahan dan Konsumsi Pangan serta Status Yodium Ibu Hamil di Kecamatan Saparua Maluku Tengah Intje Picauly, Hardinsyah, Ali Khomsan dan Rimbawan	62

STUDI EVALUASI TABUNGAN KELUARGA SEJAHTERA (TAKESRA) DAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA (KUKESRA) DI KABUPATEN SOPPENG

(The Evaluation Study of Prosperous Family Savings and Prosperous Family Business Credit
in Soppeng Regency)

A. Amrullah¹, Ujang Sumarwan², Sri Utami Kuntjoro³, Ali Khomsan²

ABSTRACT. *The proposed study was to know implementation of Prosperous Family Savings (Takesra) and Prosperous Family Business Credit (Kukesra). This study was conducted in Soppeng Regency, South Sulawesi Province. The total sample was 76 women accepting Takesra and Kukesra. Takesra/Kukesra implementation processes involve inputs, process and output. The outputs of Takesra were: 1) active depositors were 26,32 % and passive depositors were 73,68 %. 2) The balance of Takesra declines from Rp. 101.435.435 to Rp. 99.777.131. The outputs of Kukesra were: 1) amount of groups accepting Kukesra increases from 140 groups to 163 groups. 2) amount of Kukesra fund rises from Rp. 210.740.000 to Rp. 281.460.000. 3) amount of groups behind in their credit payments declined from 75 groups to 64 groups. 4) amount of Kukesra outstanding declined from Rp. 58.984.493 to Rp. 55.876.084. 5) Paired Samples t Test showed that income after receiving Kukesra was different than before. The Spearman's Correlation Analysis showed that knowledge about Takesra/ Kukesra was related to attitude of participant. The Chi-Square Analysis showed that attitude of participant was related to being active of Takesra. Pearson's Correlation Analysis showed that amount of Kukesra was related to the increase income.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menjadikan keluarga sebagai sasaran pemikiran dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan perwujudan pasal 33 UUD 45 mengenai kesejahteraan sosial. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera disebutkan bahwa penyelenggaraannya diwujudkan melalui pembangunan kualitas keluarga.

Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (miskin) tercatat secara nasional sebanyak 17 juta keluarga atau 38,0 persen dari total keluarga. Keluarga tersebut masih dalam keadaan belum atau baru sebatas dapat memenuhi kebutuhan fisik minimumnya saja sehingga tidak sepenuhnya dapat berperan dalam meningkatkan pendapatannya (BKKBN, 1998).

Agar masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga maka pemerintah memberikan tabungan keluarga sejahtera (Takesra) dan kredit usaha keluarga sejahtera (Kukesra) kepada Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I. Dari jumlah dana Takesra sebesar Rp. 22.922.512.000 yang telah disediakan, jumlah dana yang dapat diserap baru mencapai Rp. 21.947.180.000. Selain itu masih terdapat tunggakan Kukesra sebesar Rp. 14.246.607.498 dan tunggakan bunga Kukesra sebesar Rp. 171.449.727 (BNI, 1998). Data yang telah dikemukakan mengindikasikan dua permasalahan pokok yaitu kurangnya keaktifan Takesra dan besarnya tunggakan Kukesra.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi kegiatan Takesra dan Kukesra.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dan berpengaruh terhadap keaktifan Takesra dan tunggakan Kukesra.

¹ Alumni S2 PGMK Pascasarjana, IPB

² Staf Pengajar Jurusan GMSK, Faperta IPB

³ Staf Pengajar Jurusan Sosek Pertanian, Faperta IPB

METODOLOGI

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Liliriaja dan Lilirilau Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian mulai bulan Oktober 1998 sampai Mei 1999.

Penentuan Responden

Responden penelitian adalah keluarga yang telah mendapat bantuan Takesra dan Kukesra. Responden dipilih dengan cara menelusuri desa-desa yang menjadi lokasi kegiatan Takesra/Kukesra dan mencari keluarga yang telah memanfaatkan bantuan Takesra dan Kukesra. Jumlah responden yang ditemukan di Kecamatan Liliriaja sebanyak 33 orang yang tersebar di 9 desa dan di Kecamatan Lilirilau sebanyak 43 orang yang tersebar di 11 desa. Responden ini (76 orang) secara partisipatif diminta kesediaannya untuk diwawancarai.

Jenis Data dan Analisis Data

Data primer yang diperoleh mencakup keadaan sosial ekonomi, keaktifan Takesra, jumlah Kukesra, tunggakan Kukesra, biaya dan pendapatan usaha ekonomi produktif, pemahaman dan sikap terhadap Takesra dan Kukesra serta aktifitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Takesra dan Kukesra. Data sekunder mengenai perkembangan saldo Takesra, realisasi Kukesra, tunggakan Kukesra, jumlah kelompok UPPKS, jumlah kredit, tahapan keluarga sejahtera dan monografi Kabupaten Soppeng diperoleh dari berbagai instansi terkait.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap input kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan output kegiatan Takesra dan Kukesra kemudian diuraikan dalam bentuk narasi dan tabulasi. Analisis statistik dilakukan untuk menguji hubungan berbagai variabel dengan menggunakan uji Chi-Square, Korelasi Spearman dan Korelasi Pearson. Untuk mengetahui pengaruh keadaan sosial ekonomi responden terhadap keaktifan Takesra dan tunggakan Kukesra dilakukan uji Regresi Logistik. Sedangkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan usaha sebelum dan setelah ada Kukesra dilakukan uji t (*paired sampel t test procedure*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Takesra

1. Input Takesra

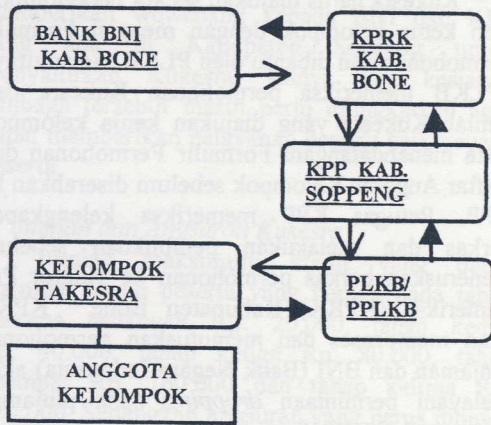
Pelayanan Takesra dan Kukesra dilakukan di 4 KPP yaitu KPP Watansoppeng berada di Kecamatan Lalabata, KPP Cabenge di Kecamatan Lilirilau, KPP Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa dan KPP Takalala di Kecamatan Marioriwawo. Syarat yang harus dipenuhi apabila ingin membuka rekening di Kantor Pos adalah telah memiliki kelompok yang anggotanya berkisar antara 10 - 30 orang (keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I). Bahan yang telah dipersiapkan petugas adalah Lembar Takesra Kuning, buku petunjuk bersama pelaksanaan Takesra, slip penyeteroran dan pengambilan Takesra serta Lembar Takesra Biru. Petugas yang dilibatkan dalam kegiatan Takesra adalah PPLKB, PLKB dan petugas KPP. Sedangkan jumlah dana yang telah diberikan kepada masing-masing anggota sebanyak Rp. 2.000. Dana yang telah disalurkan kepada seluruh peserta di Kabupaten Soppeng sebanyak Rp. 10.860.000.

2. Proses Pelaksanaan Takesra

a. Pembukaan Rekening

Rekening Takesra kelompok di Kantor Pos hanya dapat dibuka oleh ketua kelompok yang disahkan oleh PLKB/PPLKB. Setelah mendaftar semua anggotanya, ketua kelompok mengisi surat keterangan (SK-3) dan diserahkan bersama bukti diri (KTP) yang masih berlaku. Petugas Kantor Pos Pembantu (KPP) memeriksa data yang dicantumkan dalam SK-3. Berdasarkan data dari KPP, KPRK menerbitkan Lembar Takesra sekaligus pemberian nomor rekening dan mengirim laporan ke Bank BNI Kabupaten Bone. Setelah Lembar Takesra ditandatangani oleh petugas KPRK dan dibubuhi stempel maka Lembar Takesra tersebut dikirim ke KPP dan selanjutnya diserahkan ke ketua kelompok melalui PLKB/PPLKB. Proses pembukaan rekening/ pengajuan Takesra tersebut telah sesuai dengan ketentuan tetapi dapat dipercepat dengan cara memberikan wewenang kepada KPP yang ada di Kabupaten Soppeng untuk menerbitkan Takesra. Oleh karena itu KPP di Kabupaten

Soppeng harus dilengkapi fasilitas komputer agar kinerja petugas dapat ditingkatkan.



Gambar 1. Proses Pembukaan Rekening Takesra.

b. Penyetoran dan Pengambilan Takesra

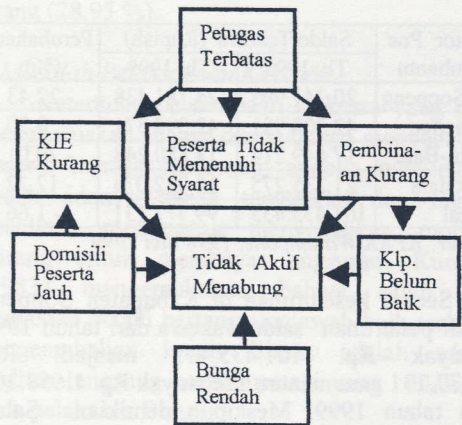
Penyetoran Takesra kelompok dilakukan oleh ketua kelompok dengan cara mengisi slip penyetoran (TKS-3), dan dibuat rangkap dua, asli dikirim ke KPRK Kabupaten Bone dan tembusannya disimpan di KPP. Penarikan Takesra kelompok juga dilakukan di KPP dengan cara mengisi slip pengambilan (TKS-4) rangkap dua. Sedangkan penyetoran dan pengambilan Takesra oleh anggota kelompok dilakukan di ketua kelompok. Besarnya bunga adalah 12 % per tahun dan dibayarkan atau dibukukan setiap akhir bulan.

c. Pembinaan Takesra

Dari 76 responden yang diwawancarai terdapat 53 orang (69,74 %) yang pernah mengikuti pembinaan dan pada umumnya (59,21 %) responden mendapat materi pembinaan tentang kedisiplinan menabung. Masalah yang sering dihadapi adalah keterbatasan dana dan waktu PLKB dalam melakukan kegiatan pembinaan karena mereka juga dibebani berbagai tugas yang lain. Masalah serupa juga ditemukan dalam penelitian Megawangi dkk. (1997) hal mana disebutkan bahwa karena kesibukan tugas PPLKB/PLKB yang cukup besar dan besarnya beban tugas yang harus dilaksanakan, pembinaan mereka melalui kunjungan rutin ke kelompok tidak dapat dilakukan secara optimal.

d. Masalah Pelaksanaan Takesra

Masalah kurangnya keaktifan Takesra tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi merupakan masalah yang muncul akibat masalah-masalah lain yang mempengaruhi. Hal ini berarti bahwa penyelesaian suatu masalah tidak dapat dilepaskan dari penanganan masalah lain. Hubungan antara suatu masalah dengan masalah lain dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Kausalitas Masalah Takesra

Keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, tidak hanya menyebabkan kurangnya kegiatan pembinaan tetapi juga menyebabkan kurangnya kegiatan KIE yang berdampak terhadap rendahnya keaktifan peserta dalam kegiatan Takesra. Selain itu keaktifan peserta menabung juga dipengaruhi oleh rendahnya bunga Takesra, domisili peserta jauh dan organisasi kelompok belum baik.

3. Output Kegiatan Takesra

a. Keaktifan Menabung

Kegiatan Takesra mulai dari input sampai proses pelaksanaan ditujukan agar semua peserta aktif menabung, namun harapan tersebut belum sepenuhnya dapat menjadi kenyataan. Dari 76 responden yang diwawancarai baru 20 orang (26,32 %) aktif menabung, sementara 56 orang (73,68 %) masih termasuk dalam kategori penabung pasif. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keaktifan menabung sebaiknya tidak terlepas dari penanganan berbagai masalah yang berkaitan dengan keaktifan peserta menabung.

b. Saldo Takesra

Meningkatnya dana masyarakat yang dapat dikumpulkan melalui Takesra juga dijadikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Takesra. Semakin banyak saldo Takesra semakin tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan Takesra.

Tabel 1. Jumlah Saldo Takesra per KPP di Kab. Soppeng.

Kantor Pos Pembantu	Saldo Takesra (Rupiah)		Perubahan (%)
	Th. 1998	Th. 1999	
W.Soppeng	20.241.995	24.781.438	22,43
Cabenge	42.308.951	42.393.371	0,20
Batu-Batu	17.649.214	13.680.248	- 29,01
Takalala	21.235.275	18.922.074	- 12,22
Total	101.435.435	99.777.131	- 1,66

Sumber: KPRK Watampone, 1998 dan 1999.

Secara keseluruhan di Kabupaten Soppeng terjadi penurunan saldo Takesra dari tahun 1998 sebanyak Rp. 101.435.435 menjadi Rp. 99.777.131 atau menurun sebanyak Rp. 1.658.304 pada tahun 1999. Meskipun demikian Saldo Takesra di KPP -Watansoppeng mengalami peningkatan sebanyak Rp. 4.539.443 dan di KPP Cabenge sebanyak Rp. 84.420. Peningkatan saldo tersebut disebabkan oleh meningkatnya tahapan Kukesra. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tahapan Kukesra, peserta diwajibkan menabung sebesar 10 % dari Kukesra yang diterima.

Implementasi Kukesra

1. Input atau Persiapan Kukesra

Ketentuan bagi anggota keluarga untuk dapat mengajukan Kukesra adalah terdaftar sebagai anggota kelompok Takesra. Bahan/berkas yang dipersiapkan adalah Formulir Permohonan Kredit, Daftar Anggota Kelompok, Perjanjian Kredit, Lembar Takesra dan Buku Petunjuk Bersama Pelaksanaan Kukesra.

Jumlah dana Kukesra yang telah dipinjamkan melalui KPP Cabenge sampai bulan Maret 1999 sebanyak Rp. 111.720.000, KPP Watansoppeng sebesar Rp. 65.460.000, KPP Batu-Batu Rp. 35.400.000 dan KPP Takalala Rp. 68.880.000. Petugas yang dipersiapkan dalam pelaksanaan Kukesra adalah PLKB, PPLKB dan petugas KPP. Sedangkan kelompok yang dipersiapkan untuk menerima Kukesra adalah kelompok yang telah memiliki Takesra.

2. Proses Pelaksanaan Kukesra

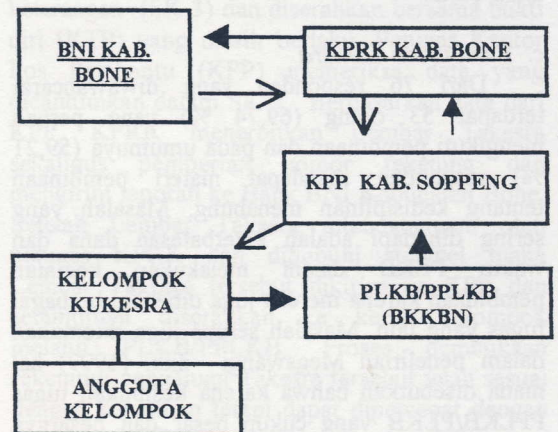
a. Pengajuan Kukesra

Kukesra harus diajukan secara berkelompok oleh ketua kelompok dengan mengisi Formulir Permohonan dan dibantu oleh PLKB. Selanjutnya PPLKB memeriksa permohonan Kukesra dan jumlah Kukesra yang diajukan ketua kelompok serta menandatangani Formulir Permohonan dan Daftar Anggota Kelompok sebelum diserahkan ke KPP. Petugas KPP memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pembukuan sebelum meneruskan berkas permohonan ke Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) Kabupaten Bone. KPRK akan memproses dan memutuskan permohonan pinjaman dan BNI (Bank Negara Indonesia) akan melayani permintaan *dropping* dana pinjaman Kukesra dari KPRK.

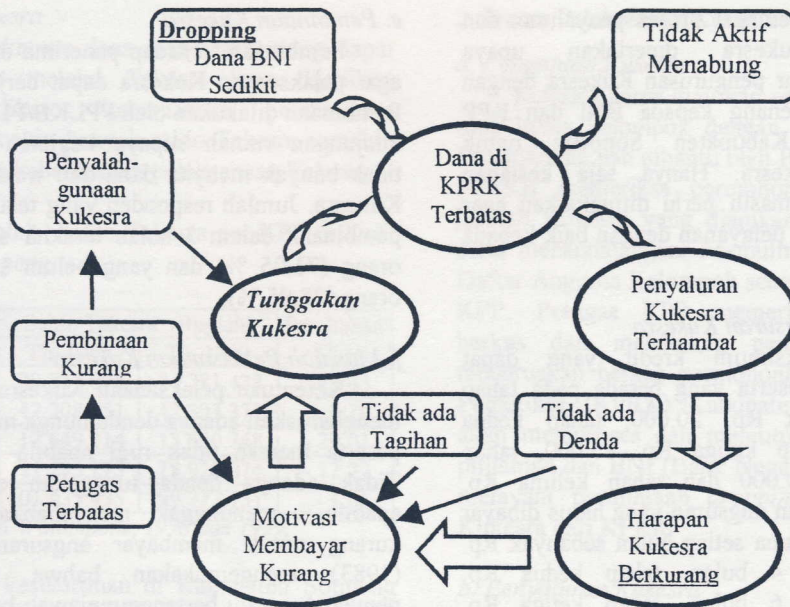
b. Penyaluran Kukesra

Permohonan Kukesra yang telah disetujui oleh KPRK Kabupaten Bone diserahkan ke KPP. Ketua kelompok menarik dana tersebut dengan menggunakan Buku Takesra kelompok tanpa melalui PPLKB/ PLKB sehingga Kukesra langsung diterima ketua kelompok.

Pada dasarnya proses pengajuan/ penyaluran Kukesra sebagaimana yang dikemukakan di atas sudah sesuai dengan ketentuan, namun proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama karena permohonan Kukesra harus mendapatkan persetujuan dari KPRK yang berada di kabupaten lain (Kabupaten Bone).



Gambar 3. Proses Pengajuan dan Penyaluran Kukesra.



Gambar 4. Kausalitas Masalah Kukesra

3. Output Kukesra

a. Realisasi Kukesra

Realisasi Kukesra merupakan indikator yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Kukesra dan dapat dilihat dari dua aspek yaitu realisasi jumlah kelompok yang menerima Kukesra dan jumlah Kukesra yang telah disalurkan kepada kelompok. Keberhasilan pelaksanaan Kukesra di Kabupaten Soppeng ditunjukkan oleh peningkatan persentase realisasi kelompok penerima dan persentase peningkatan realisasi Kukesra.

Tabel 2. Perubahan Realisasi Kelompok Penerima dan Peningkatan Dana Kukesra.

Kantor Pos Pembantu	Perubahan Realisasi	
	Kelompok (%)	Dana (%)
W. Soppeng	22,80	135,81
Cabenge	2,08	24,74
Batu-Batu	- 3,13	5,55
Takalala	20,45	15,03
Total	10,04	33,56

Jumlah kelompok penerima Kukesra pada tahun 1998 meningkat dari 140 kelompok (61,14%) menjadi 163 kelompok (71,18 %) pada tahun 1999 atau meningkat sebanyak 10,04 %. Sedangkan jumlah Kukesra yang telah disalurkan meningkat dari Rp. 210.740.000 menjadi Rp. 281.460.000 atau meningkat sebanyak 33,56 %. Peningkatan jumlah Kukesra disebabkan oleh peningkatan jumlah penerima dan peningkatan tahapan Kukesra. Meskipun telah terjadi peningkatan jumlah kelompok yang menerima Kukesra dan peningkatan jumlah dana Kukesra, namun persentase anggota kelompok yang menerima Kukesra dari ketua kelompok masih sangat sedikit atau sekitar 4 % dari total anggota.

b. Tunggakan Kukesra

Dari hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa jumlah penunggak sebanyak 27,63 %. Sedangkan jumlah kelompok yang menunggak di Kabupaten Soppeng pada tahun 1998 masih cukup besar yaitu 53,57 % namun pada tahun 1999 turun menjadi 39,26 % atau turun sebanyak 14,31 %.

Jumlah tunggakan di Kabupaten Soppeng telah berkurang sebanyak 5,56 %, namun demikian jumlah tunggakan masih cukup besar (Rp. 55.876.084). Selain itu penurunan hanya

Untuk mempercepat proses penyaluran dan pemanfaatan Kukesra diperlukan upaya memperpendek alur pengurusan Kukesra dengan memberikan wewenang kepada BNI dan KPP yang ada di Kabupaten Soppeng untuk menyalurkan Kukesra. Hanya saja kesiapan lembaga tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada peserta.

c. Jumlah dan Angsuran Kukesra

Jumlah maksimum kredit yang dapat diajukan setiap peserta yang berada pada tahap pertama sebanyak Rp. 20.000, tahap kedua Rp. 40.000, tahap ketiga Rp. 80.000, tahap keempat Rp. 160.000 dan tahap kelima Rp. 320.000. Sedangkan angsuran yang harus dibayar peserta tahap pertama setiap bulan sebanyak Rp. 5.062,50 selama 4 bulan, tahap kedua Rp. 6.785,34 selama 6 bulan, tahap ketiga Rp. 10.205,00 selama 8 bulan, tahap keempat Rp. 16.440,00 dan tahap kelima Rp. 27.533,33 selama 10 bulan.

Jangka waktu pengembalian Kukesra yang singkat sering dikeluhkan oleh peserta karena Kukesra yang mereka pinjam masih dipakai dalam usahanya. Hasil penelitian Hartoyo, dkk. (1999) juga mengemukakan bahwa masalah pengembalian kredit dirasakan terlalu cepat oleh peserta kredit pengembangan kemitraan usaha (KPKU). Jumlah Kukesra yang diberikan kepada setiap anggota dirasa masih kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya (82,89 %) peserta Kukesra masih menginginkan agar jumlah Kukesra ditambah.

d. Pemanfaatan Kukesra

Salah satu tujuan pemberian Kukesra adalah merangsang kesadaran, motivasi dan semangat keluarga untuk berwirausaha. Jumlah responden yang memanfaatkan Kukesra untuk usaha ekonomi produktif sebanyak 68 orang (89,47 %) dan responden yang memanfaatkan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan rumahtangga yaitu sebanyak 8 orang (10,53 %). Penelitian Megawangi dkk. (1997) di Propinsi Bali, NTB dan Yogyakarta juga menemukan beberapa kasus yaitu pinjaman yang diberikan bukan untuk usaha si ibu sendiri tetapi untuk anggota keluarga lain.

e. Pembinaan Kukesra

Pembinaan terhadap penerima dimaksudkan agar pelaksanaan Kukesra dapat berjalan lancar. Pembinaan dilakukan oleh PPLKB/PLKB melalui kunjungan rumah supaya kegiatan pembinaan tidak banyak menyita dana dan waktu penerima Kukesra. Jumlah responden yang telah menerima pembinaan dalam 3 bulan terakhir sebanyak 54 orang (71,05 %) dan yang belum sebanyak 22 orang (28,95 %).

f. Masalah Pelaksanaan Kukesra

Ketentuan pelaksanaan Kukesra yang tidak mengharuskan adanya denda bunga menyebabkan peserta merasa tidak rugi apabila menunggak. Tidak adanya denda tunggakan dan tagihan apabila menunggak menyebabkan motivasi kurang untuk membayar angsuran. Kuntjoro (1983) mengemukakan bahwa salah satu penyebab petani bertanggungjawab baik terhadap pengembalian kredit Bimas adalah adanya tagihan langsung kepada petani yang dilakukan oleh pelaksana Bimas.

Dropping dana dari BNI yang sering tidak mencukupi permintaan dan ketidakaktifan peserta di Takesra menyebabkan ketersediaan dana di KPRK terbatas. Selain itu tunggakan Kukesra juga menyebabkan dana yang tersedia di KPRK tidak bertambah sehingga penyaluran dana ke peserta tertunda. Keterlambatan penyaluran dana tersebut mengurangi kepercayaan peserta terhadap kelangsungan kegiatan Kukesra sehingga harapan untuk memperoleh Kukesra pada tahap berikutnya semakin sedikit. Hilangnya harapan tersebut menjadi penghambat pembayaran angsuran karena pembayaran angsuran tidak lagi menjadi motivator pengembalian kredit.

Terhambatnya pembayaran angsuran menyebabkan dana yang tersedia di KPRK semakin berkurang dan masalah ini terus berputar ke masalah semula apabila tidak disertai upaya penanggulangan. Kausalitas masalah Kukesra dapat dilihat pada gambar 4.

terjadi di wilayah KPP Cabenge, sedangkan di KPP Watansoppeng, Takalala dan Batu-Batu jumlah tunggakan cenderung meningkat.

Tabel 3. Perubahan Jumlah Penunggak dan Tunggakan Kukesra.

Kantor Pos Pembantu	Perubahan Jumlah (%)	
	Penunggak	Tunggakan
W. Soppeng	- 25,68	2,73
Cabenge	- 17,32	- 16,52
Batu-Batu	8,48	33,68
Takalala	- 0,86	49,70
Total	- 14,31	- 5,56

c. Usaha Ekonomi Produktif

Jumlah usaha yang telah mengalami peningkatan pendapatan sebanyak 63 usaha (92,65 %). Rata-rata peningkatan pendapatan usaha sebanyak Rp. 58.193. Berdasarkan uji t (*paired sampel t test procedure*), dengan nilai t = - 8,172, df 75 dan nilai p = 0,000, ditemukan bahwa terdapat perbedaan nyata antara pendapatan sebelum dan setelah ada Kukesra.

Jenis usaha yang mengalami peningkatan pendapatan adalah usaha perdagangan sedangkan usaha di bidang pertanian sebagian besar (55,56%) belum mengalami peningkatan karena jangka waktu proses produksi pertanian relatif lama sehingga dampak pemberian Kukesra terhadap peningkatan pendapatan usahatani belum tampak. Penelitian Binari (1993) juga menemukan bahwa kredit yang diterima rumahtangga pedesaan berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan sektor non usahatani dan tidak berpengaruh nyata terhadap usahatani.

Hubungan Keadaan Sosial Ekonomi dengan Takesra dan Kukesra

1. Sikap Peserta terhadap Takesra dan Kukesra

Uji Korelasi Spearman terhadap hubungan antara pemahaman dengan sikap diperoleh nilai $r_s = 0,503$ dan $p = 0,000$. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan sangat nyata antara pemahaman dengan sikap responden terhadap kegiatan Takesra. Responden yang memiliki pemahaman tentang kegiatan Takesra dan Kukesra dapat menyadari tujuan

yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut sehingga ada kecenderungan memiliki sikap baik. Meskipun demikian tidak ditemukan hubungan nyata antara umur dengan sikap peserta ($p = 0,657$). Responden yang berumur muda juga ada yang memiliki sikap baik terhadap Takesra/Kukesra karena mereka sering mengikuti kegiatan BKKBN dan telah mengenal baik petugas sehingga mereka menganggap kegiatan yang dilakukan petugas BKKBN termasuk Takesra/Kukesra akan bermanfaat bagi peserta.

2. Keaktifan Takesra

Keaktifan Takesra digolongkan dalam kategori aktif dan pasif. Variabel yang diduga berhubungan dengan keaktifan Takesra adalah sikap peserta, jumlah anggota rumahtangga, dan pendapatan per kapita per tahun.

Tabel 4. Analisis Chi-Square Terhadap Keaktifan Takesra

Variabel Dependen	Variabel Independen	X ²	p
Keaktifan Takesra	Sikap Peserta	6,786	0,009
	Jumlah anggota Rumahtangga	0,075	0,784
	Pendapatan	0,093	0,760

Hasil uji Chi-Square (X²) pada Tabel 4 menunjukkan adanya hubungan yang sangat nyata ($p = 0,009$) antara sikap responden dengan keaktifan menabung di Takesra. Hal ini berarti bahwa semakin baik sikap mereka cenderung semakin aktif dalam kegiatan Takesra. Apabila perilaku dihubungkan dengan sikap maka dapat dikatakan bahwa sikap merupakan penguat kepercayaan seseorang dan biasanya menarik situasi perasaan yang kuat, yang akan mengakibatkan bentuk perilaku khusus yang merupakan komponen kecenderungan tindakan (Oppenheim, 1973).

3. Tunggakan Kukesra

Tunggakan Kukesra dalam uji Chi-Square dikategorikan dalam dua kategori yaitu menunggak dan tidak menunggak. Ada empat variabel independen yang diuji yaitu jumlah Kukesra, sikap peserta, jumlah anggota rumahtangga dan pendapatan per kapita per tahun.

Tabel 5. Analisis Chi-Square terhadap Tunggakan Kukesra

Variabel Dependen	Variabel Independen	X ²	p
Tunggakan Kukesra	Jumlah Kukesra	0,458	0,499
	Sikap Peserta	0,066	0,798
	Agt. Rumah tangga	0,293	0,589
	Pendapatan	0,007	0,935

Hasil uji Chi-Square pada Tabel 5 tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk mendukung adanya hubungan antara jumlah Kukesra, sikap peserta, jumlah anggota rumah tangga dan pendapatan per kapita per tahun dengan tunggakan Kukesra. Responden yang mendapat banyak Kukesra belum tentu menunggak karena mereka cenderung meminta Kukesra sesuai dengan kemampuan membayar angsuran. Jumlah angsuran per bulan tidak memberatkan keluarga sehingga yang mempunyai anggota keluarga banyak dan pendapatan rendah juga memiliki kemampuan membayar angsuran Kukesra. Hubungan antara sikap peserta dengan tunggakan Kukesra tidak nyata, diduga karena adanya multi korelasi antara berbagai variabel.

4. Usaha Ekonomi Produktif

Uji Korelasi Pearson menunjukkan adanya korelasi positif antara jumlah Kukesra dengan peningkatan pendapatan usaha ekonomi produktif dengan koefisien korelasi $r = 0,298$ dan $p = 0,009$. Angka tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak Kukesra yang diperoleh, peningkatan pendapatan usaha mereka semakin besar. Hal ini terjadi karena sebagian besar (89,47 %) responden telah memanfaatkan Kukesra untuk usaha ekonomi produktif sehingga jumlah Kukesra turut mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha peserta.

Pengaruh Keadaan Sosial Ekonomi terhadap Keaktifan Takesra dan Tunggakan Kukesra

Analisis Regresi Logistik dengan metode *Backward Stepwise* digunakan untuk mengetahui pengaruh keadaan sosial ekonomi (variabel independen) terhadap keaktifan Takesra dan tunggakan Kukesra (variabel dependen).

Tabel 6. Analisis Regresi Logistik Berganda

Variabel Dependen	Variabel Independen	β	p
Y = Keaktifan Takesra Kategori: 0 = Tdk Aktif 1 = Aktif	Sikap	0,18	0,059
	Umur	0,09	0,005
	Konstanta	- 8,65	0,002
Y = Tunggakan Kukesra Kategori: 0 = Tidak Menunggak 1 = Menunggak	Pemahaman	0,35	0,052
	Sikap	- 0,19	0,021
	Konstanta	0,49	0,764

Hasil analisis Regresi logistik menunjukkan bahwa semakin baik sikap responden dan umur semakin tua, maka kemungkinan untuk aktif di Takesra semakin besar. Responden yang berumur tua cenderung menyimpan uangnya di Takesra untuk dimanfaatkan di masa mendatang ketika mereka tidak produktif lagi. Triandis (1971) mengemukakan bahwa sikap berhubungan dengan perilaku. Responden yang memiliki sikap baik diduga beranggapan bahwa kegiatan Takesra akan meningkatkan kesejahteraannya sehingga memiliki perilaku aktif di Takesra.

Pada Tabel 6 juga dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai pemahaman dan semakin rendah nilai sikap akan menyebabkan kemungkinan kemungkinan menunggak semakin besar. Responden yang memiliki nilai pemahaman tinggi mengetahui bahwa tidak ada sanksi yang memberatkan sehingga mereka cenderung menunggak. Responden yang memiliki nilai sikap rendah diduga tidak menyadari maksud baik maksud baik pelaksanaan Kukesra sehingga mereka cenderung menunggak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Secara umum kegiatan Takesra telah dilakukan sesuai dengan ketentuan namun output kegiatan belum sesuai dengan harapan karena jumlah penabung aktif sedikit dan ada

- kecenderungan jumlah saldo Takesra semakin berkurang.
2. Meskipun pelaksanaan Kukesra telah menunjukkan kemajuan namun jumlah tunggakan masih cukup besar dan jumlah anggota yang menerima Kukesra masih sedikit. Kemajuan Kukesra ditandai dengan meningkatnya jumlah kelompok penerima dan realisasi dana Kukesra serta menurunnya jumlah kelompok penunggak dan tunggakan.
 3. Semakin baik pemahaman peserta, semakin baik sikap mereka dan semakin aktif dalam kegiatan Takesra. Faktor yang berpengaruh nyata terhadap keaktifan Takesra adalah sikap dan umur peserta, sedangkan faktor yang berpengaruh nyata terhadap tunggakan Kukesra adalah sikap dan pemahaman peserta.

Rekomendasi

1. Kegiatan pembinaan Takesra perlu ditingkatkan dan penyesuaian bunga Takesra dengan bunga bank perlu dilakukan agar keaktifan Takesra dapat ditingkatkan. Kegiatan pembinaan seyogyanya dikaitkan dengan kegiatan lain yang dilakukan PLKB agar tugas pembinaan dapat berjalan dengan baik.
2. Mengurangi jumlah penunggak dan jumlah tunggakan dapat dilakukan melalui upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dapat dilaksanakan dengan mengarahkan peserta agar memanfaatkan Kukesra untuk usaha ekonomi produktif dan membina mereka agar usaha tersebut menguntungkan. Upaya kuratif dapat dilakukan melalui tagihan intensif dan bila memungkinkan diterapkan denda tunggakan setelah diberikan perpanjangan waktu pembayaran. Selain itu pengawasan petugas terhadap penyaluran Kukesra ke seluruh anggota perlu dilakukan agar semua anggota menerima Kukesra sesuai dengan haknya.
3. Upaya menumbuhkan sikap yang mendukung pelaksanaan kegiatan Takesra dan Kukesra

perlu dilakukan agar dapat meningkatkan keaktifan Takesra dan mengurangi jumlah tunggakan Kukesra. Mengingat bantuan Kukesra turut memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan usaha ekonomi produktif peserta maka bantuan tersebut perlu diteruskan dan sebaiknya menjangkau lebih banyak peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Binari. 1993. Analisis Perilaku Meminjam dan Menabung Rumahtangga Pedesaan. Kasus Tiga Desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Program Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- BKKBN, 1998. Gerakan KB Nasional dalam Grafik dan Gambar. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. Jakarta.
- BNI, 1998. Laporan Dana Takesra dan Kukesra Per 31 Januari 1998. Jakarta.
- Hartoyo, D.Hastuti, U.Sumarwan, Iswarati, I.A.Sriudiyani, H.Puspitawati, S. Pangemanan. 1999. Kesiapan Pelaksanaan Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU). GMSK IPB – BKKBN. Jakarta.
- Kuntjoro. 1983. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bimas Padi. Fakultas Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Megawangi, R., Iswarati, E. Purwanto, U. Sumarwan, I.A. Sriudiyani, D. Wahyuni & S. Pangemanan. 1997. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan UPPKS: Identifikasi Kebutuhan dan Penembangan UPPKS. ISI dan BKKBN. Jakarta.
- Oppenheim, A. N, 1973. Questionare Design and Attitude Measurement. Heineman, London.
- Triandis, Harry C. 1971. Attitude and Attitude Change. John Wiley and Son. New York.